

BAB III
KONFLIK BERSENJATA DI PROVINSI PAPUA YANG
MEMPENGARUHI STABILITAS KEAMANAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang Terjadinya Konflik di Provinsi Papua

Konflik di Papua selama ini bukanlah persoalan baru di Indonesia, baik konflik dalam spektrum kekerasan, maupun konflik yang terkait dengan gerakan-gerakan kesukuan. Kalau dihubungkan dengan isu-isu separatisme, pemekaran, dan otonomi khusus (Otsus), dimensi politik sangat mewarnai konflik di Papua. Belum lagi dimensi selain politik apabila dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya alam Papua. Rangkaian fenomena konflik yang terjadi di Papua apabila dibuatkan rangkuman berdasarkan kejadian penting (*milestone*) yang terjadi selama ini adalah sebagai berikut :

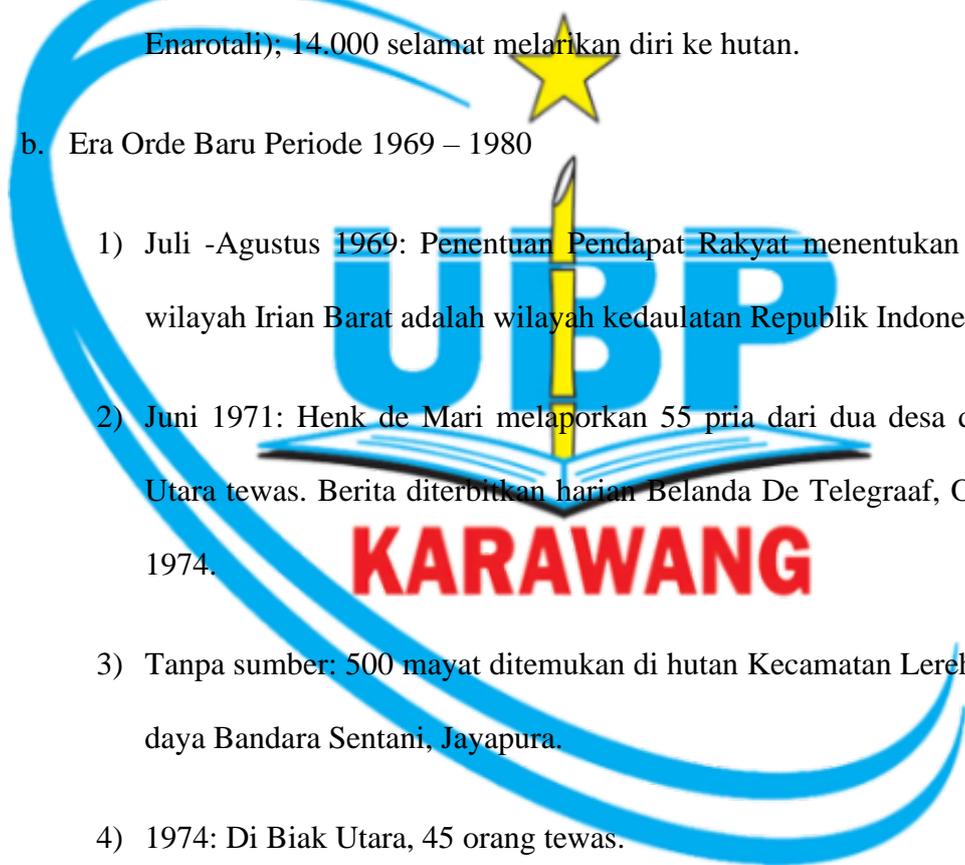
a. Era administrasi sementara PBB (1962-1969)

- 1) 15 Agustus 1962: Perjanjian New York oleh Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan PBB. Wilayah Irian Barat diserahkan oleh Kerajaan Belanda pada administrasi Otoritas Eksekutif Sementara PBB, diikuti dengan pertempuran sporadis antara milisi / tentara pro-Indonesia dan pro-Belanda hingga 1969.
- 2) 1966 - 1967: pengeboman udara Pegunungan Arfak

- 3) Januari-Maret 1967: pengeboman udara wilayah Ayamaru dan Teminabuan
- 4) 1967: Operasi Tumpas, 1.500 diduga tewas di Ayamaru, Teminabuan dan Inauatan.
- 5) April 1969: pengeboman udara Danau Wissel (daerah Paniai dan Enarotali); 14.000 selamat melarikan diri ke hutan.

b. Era Orde Baru Periode 1969 – 1980

- 1) Juli -Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
- 2) Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
- 3) Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
- 4) 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
- 5) 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
- 6) 1977: pengeboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
- 7) 1977 - 1978: pengeboman udara Lembah Baliem.

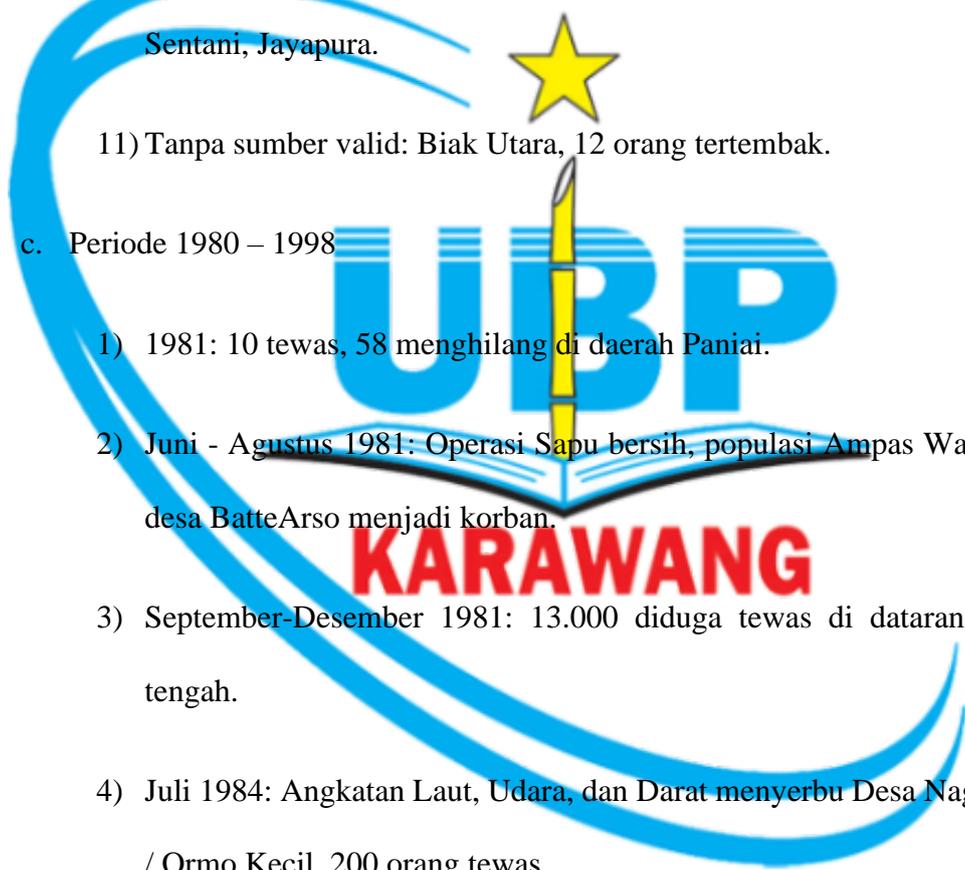


- 8) April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasi ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
- 9) Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
- 10) June 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.

11) Tanpa sumber valid: Biak Utara, 12 orang tertembak.

c. Periode 1980 – 1998

- 1) 1981: 10 tewas, 58 menghilang di daerah Paniai.
- 2) Juni - Agustus 1981: Operasi Sapu bersih, populasi Ampas Waris dan desa BatteArso menjadi korban.
- 3) September-Desember 1981: 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah.
- 4) Juli 1984: Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu Desa Nagasawa / Ormo Kecil, 200 orang tewas.
- 5) Tanpa sumber: Bombardir dari laut di Taronta, Takar, dan desa pesisir MasiMasi; yang selamat melarikan diri ke arah Jayapura; pada 1950 dikuasai Belanda dan masing-masing desa berpopulasi 1500-2000.
- 6) 24 Juni 1985: 2.500 tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wissel, termasuk 115 dari desa-desa Iwandoga dan Kugapa.



- 7) 1986 - 1987: 34 tertembak di Paniai / Wissel Lake District.
- 8) 8 Januari 1996: Krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin Kelly Kwalik menyandera 26 orang di Irian Jaya, memicu Operasi pembebasan sandera Mapenduma (dua sandera tewas) dan Insiden Penembakan Timika 1996 (16 orang tewas).¹
- 9) 9 Mei 1996: Krisis sandera Mapenduma, berakhir dengan serbuan Kopassus ke Desa Geselama, di Mimika.
- d. Era Reformasi Periode 1998 – 2010
- 1) 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa mengumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massamemulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga nonPapua tewas.²
- 2) 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.³

¹ Free Papua Movement Action Update, <https://fas.org/irp/world/para/papua.htm>. Di akses pada 2 November 2020

² Violence And Political Impasse In Papua, <http://www.hrw.org/reports/2001/papua/PAPUA0701.pdf>. Di akses pada 2 November 2020

³ Country Reports on Human Rights Practices Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2001, <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/eap/8314.htm>. Di akses pada 2 November 2020

- 3) 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.⁴
- 4) 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
- 5) 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.⁵
- 6) 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.⁶
- 7) Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demonstrasi besar yang diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.⁷

⁴ Indonesian Military Shoots US Teachers, Blames Attack on Rebel Group, http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=free_papua_movement_1. Di akses pada 2 November 2020

⁵ 'Papua separatists' kill six civilians, <https://archive.is/2lr3#selection-357.0-357.39>. Di akses pada 2 November 2020

⁶ Sweeping operations by the military and police resulted in a number of Papuans being killed, http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-5336693/LEAD-4-security-personnel-killed.html. Di akses pada 2 November 2020

⁷ The killing of a Papuan at a demonstration remains unpunished, <http://www.humanrights.asia/news/urgentappeals/AHRC-UAC-152-2009/>. Di akses pada 2 November 2020

- 8) 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.
- 9) 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi.
- 10) 14 Maret 2009: Satu personel TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.
- 11) Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.
- 12) 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang.⁸ Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.⁹
- 13) 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.
- 14) Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.

⁸ Police Blame Group For Election attacks, <https://westpapuareview.wordpress.com/2009/04/25/police-blamegroup-for-election-attacks/>. Di akses pada 2 November 2020

⁹ Violence In Papua, <https://westpapuareview.wordpress.com/2009/04/11/violence-in-west-papua/>. Di akses pada 3 November 2020

15) 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.

16) Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.¹⁰

17) 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.¹¹

18) Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.

e. Periode 2010-an

1) 24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung jawab.¹²

¹⁰ Police and soldiers burn houses and destroy resources in Papua's Bolakme district, <http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-143-2009/>. Di akses pada 3 November 2020

¹¹ Une insurrection oubliée en Papouasie indonésienne, <http://pourconvaincre.blogspot.com/2009/08/uneinsurrection-oubliee-en-papouasie.html>. Di akses pada 3 November 2020

¹² OPM Denies Responsibility For Ambush And Calls Police Accusation Baseless, <http://thejakartaglobe.com/news/opm-denies-responsibility-for-ambush-and-calls-police-accusationbaseless/355047>. Di akses pada 3 November 2020

- 2) 1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.¹³
- 3) 23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia, melukai beberapa tentara.¹⁴
- 4) Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.¹⁵
- 5) 17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.
- 6) 21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban.
- 7) 15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.

¹³ AWPAs Calls Rudd To Raise West Papua With Indonesia, <http://pacific.scoop.co.nz/2010/03/awpa-calls-rudd-to-raise-west-papua-with-indonesia/> Di akses pada 4 November 2020

¹⁴ West Papua Report on April 2010, http://www.freewestpapua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&Itemid=2. Di akses pada 4 November 2020

¹⁵ West Papua Report on June 2010, <http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1006wpap.htm>. Di akses pada 4 November 2020

- 8) 23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.
- 9) Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.¹⁶
- 10) 6 Juli 2011: Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.
- 11) 20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyerangan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.
- 12) 31 Juli 2011: Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.
- 13) 1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.
- 14) 2 Agustus 2011: Seorang personel TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tinggi nambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.
- 15) 3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.

¹⁶ West papua Report on July 2010, <http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1007wpap.htm>. Di akses pada 5 November 2020

- 16) 22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.¹⁷
- 17) 2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.¹⁸
- 18) 5 Desember 2011: Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak menembak dengan tersangka anggota OPM.
- 19) 12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.
- 20) Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.
- 21) 22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personel yang tewas

¹⁷ West Papua Report on November 2011, <http://etan.org/issues/wpapua/2011/1111wpap.htm>. Di akses pada 5 November 2020

¹⁸ Police Officer Killed in Papua, <http://news.asiaone.com/News/Latest%2BNews/Asia/Story/A1Story20111202-313999.html>. Di akses pada 5 November 2020

melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personel TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.

Konflik Papua yang bersifat multi-dimensi—sejak 1963 hingga saat ini—masih sulit dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan pola kebijakan ataupun pendekatan kepada permasalahan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan dampak dari dimensi politik, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan, dimana antara satu dimensi selalu terkait dengan dimensi lainnya. Luasnya wilayah dan beratnya medan perjalanan transportasi menjadi penentu lain dalam menjalin komunikasi antar daerah dengan daerah lain.

B. Tindakan yang telah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani konflik bersenjata di Provinsi Papua

Keadaan di Papua berkaitan pada isu serta adanya politik. Sengketa politik sampai saat ini sampai pada penciptaan saling curiga, hingga rasa ketidakpercayaan (*distrust*) berkembang pada antara lain dengan pemerintah dan orang Papua.

Distrust bertambah penguatan tuduhan sepihak dengan diskriminasi warna kulit. Contohnya klaim aktivis pro-kemerdekaan bahwasannya Papua merupakan “koloni Indonesia”, kebalikannya isu Papua selaku separatis oleh para nasionalis. Usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan keadaan dan kondisi di Papua cenderung dilabel selaku penyingkiran oleh aktivis HAM serta sebagian warga Papua.

Rasa tidak puas dari masyarakat Papua dari kebijakan nasional dengan belum melakukan kesejahteraan kepada orang Papua dengan Langkah tepat

seringkali jadi kecurigaan pada pemerintah, terdiri dari susunan keinginan dalam melakukan pemisahan wilayah memakai politik melalui banyak orang Indonesia dengan memakai jargon nasionalisme.

Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai hari ini sudah melakukan penerbitan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan dalam melakukan penjagaan keadaan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi pada upaya penegakan hukum kepada gangguan keamanan dengan muncul golongan kriminal bersenjata (KKB). Rangkaian peristiwa gangguan keamanan terdiri dari teror bom, penculikan, pembunuhan kepada aparat keamanan dan masyarakat dengan perusakan serta pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum, pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional serta dapat diandalkan.

Konflik memang terjadi di sejumlah daerah, Kawasan, wilayah, dan negara di dunia. Bentuk dan tipe konfliknya berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan persoalannya. Cara penanganan dan penyelesaian konflik juga berbeda diantara konflik di wilayah yang satu dengan konflik yang terjadi di wilayah lainnya.

Berbagai pendekatan dan metode penyelesaian konflik dapat dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaiannya bisa

melalui cara kerja sama, tawar-menawar, negosiasi, akomodasi dan asimilasi dengan pendekatan mekanisme komunikasi konstruktif, dialog dan perundingan dari para pihak yang terlibat konflik.

Berawal dari hal tersebut maka muncul gerakan terorisme di Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih untuk dijadikan sebagai sarang teroris, yaitu situasi politik pasca runtuhnya rezim orde baru membuka ruang begitu luas bagi berkembangnya radikalisme agama, dan yang kedua adalah lemahnya sistem kepemimpinan pemerintahan, seperti jatuhnya rezim orde baru merupakan tahapan pertama dari proses perkembangan demokrasi sedangkan tahapan kedua dan ketiga adalah masa transisi (pergantian) dan konsolidasi demokrasi (perundingan). Ada pandangan bahwa masa ini merupakan masa krisis karena demokrasi belum menemukan bentuk yang ideal sehingga momen inilah yang dimanfaatkan untuk menabur benih-benih terorisme di Indonesia.¹⁹

Dalam penentuan upaya sangat benar dalam menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah Tanah Papua secara pengakhiran Tindakan-tindakan kekerasan disebabkan kelompok separatis apapun. Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 tertulis akar masalah Papua sebagaimana berikut :²⁰

1. peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia,

¹⁹ Deny Guntara dan Budiman, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2018. hlm 112.

²⁰ Muridan S Widjoyo, *Papua Road Map*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2008.

2. tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua,
3. proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas,
4. siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas,
5. pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

Pada umumnya fungsi merupakan sebuah kondisi dimana seseorang melakukan hak serta kewajibannya pada sebuah sistem maupun organisasi. Kewajiban itu mampu terkait dengan tugas serta wewenang yang diberikan pada seseorang yang memangku selaku pejabat pada organisasi. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek:²¹

1. Peran terdiri dari kaidah-kaidah selaras pada posisi maupun wilayah seseorang pada masyarakat. Peran pada artiannya tersebut adalah susunan aturan dengan bimbingan seseorang pada kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan sebuah gagasan terkait dengan yang mampu dilaksanakan seseorang pada masyarakat selaku organisasi.
3. Peran mampu dimaknai selaku pola tingkah laku seseorang dengan penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kepolisian dimandatkan wewenang maupun diskresi pada ketentuan hukum pidana di negara ini dalam melaksanakan semua tatanan rangkaian pada siapapun

²¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002. hlm. 242.

dengan keterlibatan pada suatu kejahatan.²² Wewenang kepolisian tidaklah dalam melakukan pengaruh pada rangkaian pemidanaan, akan tetapi dalam memperkokoh rangkaian penegakan hukum. Di Indonesia kewenangan kepolisian secara eksplisit didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Brimob untuk penjagaan perbatasan wilayah, Brimob juga ditugaskan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan, disamping yang dijaga oleh pihak TNI. Khusus pada wilayah perbatasan di Papua (Wutung) terdapat pos gabungan antara TNI dan Polisi (khususnya Brimob). Pengkhususan pasukan TNI pada Kawasan ini adalah untuk mengatasi masalah Gerakan OPM. Dilain pihak gelaran pasukan Brimob diperbantukan sebagai penunjang tugas petugas imigrasi dan sebagai petugas pengatur lalu Lalang orang yang akan ke perbatasan.²³

Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menyelaraskan keamanan negara pada pola keamanan manusia. Keselamatan masyarakat dengan tanpa keterlibatan pada sengketa tersebut mampu langsung dalam hal utama tidak melihat pandangan suku serta ras antara penduduk asli dan pendatang.

Pada masa kedepan Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembangunan jajak pendapat serta negosiasi kearah rekonsiliasi. Dengan cara tahapan mampu diusahakan ruang-ruang jajak pendapat dalam pencegahan melebar

²² H. Tieger Joseph, "Police Discretion and Discriminatory Enforcement," Duke Law Journal, 1971. hlm. 717.

²³ Moch Nurhasim, *Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Papua*, LIPI, Jakarta, 2007. hlm. 113.

kecurigaan dan rasa tidak percaya, terkhusus antara masyarakat urban serta penduduk asli Papua maupun antara pihak aparat dengan masyarakat.

